

KAJIAN KONTRIBUSI PENTAHHELIX PADA DESA WISATA BERDASARKAN *SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT*

Redi Sigit Febrianto¹, Gatot Adi Susilo², Bayu Teguh Ujianto³, Sudiro³

Program Studi Arsitektur, FTSP, Institut Teknologi Nasional Malang^{1,2,3}
Program Studi Teknik Lingkungan, FTSP, Institut Teknologi Nasional Malang⁴
Jl. Sigura-gura No.2 Kota Malang
E-mail: redi_sigit@lecturer.itn.ac.id

ABSTRAK

Kemitraan pentahelix memiliki peran penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan / *sustainable tourism development* (STD). Karena potensi alam dan budayanya, pertumbuhan desa wisata dan/atau wisata pedesaan di Indonesia jadi meningkat. Oleh sebab itu dalam perencanaan-perancangan desa wisata dan/atau wisata pedesaan seringkali menyebutkan kemitraan pentahelix. Secara definitif STD memiliki tiga aspek penting, yaitu menjunjung tinggi sosial-budaya, mempertahankan alam agar dapat meningkatkan perekonomian sebagai hasil akhirnya. Kajian ini berfungsi untuk menjelaskan apa saja kontribusi dari masing-masing pelaku kemitraan pentahelix pada desa wisata dan/atau wisata pedesaan berdasarkan STD. Kajian ini berifat kualitatif dan berjenis naratif. Data dikumpulkan dari jurnal dengan obyek dan tema sejenis. Sedangkan data dianalisis dengan metode komparatif. Ditemukan bahwa masing-masing pelaku kemitraan pentahelix memiliki peran yang sama besar, namun terjadi pada waktu yang berbeda. Sebelum memutuskan menjadi desa wisata maupun wisata pedesaan diperlukan komitmen dari kemitraan pentahelix agar tidak terlalu banyak mengubah alam, tetap mempertahankan sosial-budaya dan mengandung prinsip *green economy*

Kata kunci: pentahelix, *sustainable tourism development*, *green economy*

ABSTRACT

The pentahelix partnership has an important role in sustainable tourism development (STD). Because of its natural and cultural potential, the growth of tourist villages and/or rural tourism in Indonesia is increasing. Therefore, in village tourism and/or rural tourism plans, pentahelix partnerships are often mentioned. Definitively, STD has three important aspects, namely upholding socio-culture, preserving nature in order to improve the economy as the end result. This study serves to explain the contribution of each pentahelix partnership actor to village tourism and/or rural tourism based on STD. This study is qualitative and narrative type. Data was collected from journals with similar objects and themes. Meanwhile, the data was analyzed using the comparative method. It was found that each actor in the pentahelix partnership had the same role, but occurred at different times. Before deciding to become a tourist village or rural tourism, a commitment from the Pentahelix partnership is needed so as not to change nature too much, still maintain socio-culture and contain green economy principles.

Keywords: pentahelix, *sustainable tourism development*, *green economy*

PENDAHULUAN

Kemitraan Pentahelix dianggap sebagai salah satu solusi dalam berbagai pemecahan permasalahan sosial (Tadung, 2023), seperti: perekonomian juga pariwisata bahkan saat kejadian pandemi covid 19 kemarin. Pentahelix dianggap sebagai peluang sekaligus tantangan yang terkadang membuat frustrasi pihak-pihak yang terlibat dan meningkatkan ekspektasi masyarakat (Tadung, 2023).

Karena potensi alam dan budayanya, pertumbuhan desa wisata dan/atau wisata pedesaan di Indonesia jadi meningkat

(BPS.Indonesia, 2021). Indikatornya berupa peningkatan jumlah desa wisata pada tahun 2018 menjadi 7,275 desa wisata (Pedoman.Desa.Wisata, 2021). Oleh sebab itu dalam perencanaan dan perancangan desa wisata dan/atau wisata pedesaan seringkali menyebutkan kemitraan pentahelix.

Dampak langsung pentahelix adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Namun dampak tidak langsung pentahelix, misalnya: berfungsi meningkatkan perekonomian domestik (Aribowo *et al.*, 2018); mensinkronasi pelaku-pelaku pariwisata terkait (Pusparani & Rianto, 2021).

Perlu dipahami bahwa pariwisata biasanya mengutamakan jumlah wisatawan sebanyak-banyaknya untuk mengejar profit (*greedy tourism*) (Panduan.Desa.Wisata.Hijau, 2017), cenderung mengabaikan lingkungan alam, melupakan budaya dan bukan untuk kesejahteraan sosial masyarakat desa. Akibatnya desa kehilangan daya tarik sehingga berdampak langsung pada masyarakat desa dan tidak memiliki keberlanjutan. Pentahelix secara tidak langsung juga berfungsi mencegah kejadian ini, sehingga sesuai dengan prinsip *sustainable tourism development (STR)*.

Oleh sebab itu Kemenparekraf membuat pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan (Permenparekraf_No.9, 2021). Agar sesuai dengan konsep berkelanjutan, maka kemitraan pentahelix harus memperhatikan tiga aspek STR yaitu: sosial-budaya, ekonomi dan alam.

Kemendesa PDTT juga membuat gebrakan dengan mengadakan lomba desa wisata nusantara (ldwn2023.com, 2023), membuat aplikasi pengelola desa wisata nusantara (desawisata.kemendesa.go.id, 2023) dan peraturan prioritas penggunaan dana desa 2021 untuk mewujudkan SDGs desa (Permendesa_No.13, 2020).

Tujuan artikel ini adalah untuk memahami apa saja faktor yang mempengaruhi *sustainable tourism development (STD)* pada desa dan/atau wisata pedesaan berdasarkan kemitraan *pentahelix*.

METODE

Rancangan penelitian bersifat kualitatif, karena tidak melibatkan angka sebagai indikatornya, melainkan berusaha memahami (Groat & Wang, 2013) fenomena STD dan *pentahelix*; menginterpretasi teks dan gambar (Creswell, 2010) terkait *pentahelix*; menggali faktor penting dari sumber terkait (Creswell, 2010) berupa studi literatur tentang STD.

Strategi penelitian bersifat deskriptif / naratif (Creswell, 2010), yaitu berusaha mendeskripsikan fenomena pembangunan pariwisata berkelanjutan (STD) pada desa wisata dan/atau wisata pedesaan di Indonesia. Karena menggunakan strategi deskriptif / naratif, data dikumpulkan dari tiga sumber penting yaitu: (1) studi literatur dari peraturan pemerintah (BPS, Kemendesa PDTT, Kemenparekraf), (2) studi preseden (website Kemendesa PDTT tentang desa wisata nusantara, buku pedoman desa wisata) dan (3) jurnal penelitian/abdimas tentang desa wisata.

Karena penelitian ini bersifat kualitatif dan berjenis deskriptif, maka analisis data yang digunakan: (1) analisis komparatif (karena membandingkan definisi desa wisata dan wisata pedesaan) dan (2) analisis induktif (kesimpulan perbedaan ada di bagian akhir penelitian).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Kemitraan Pentahelix

Pengembangan desa wisata adalah tanggung jawab masyarakat desa dan pemerintah desa, namun kolaborasi dari lima elemen penting (*pentahelix*) juga sangat dibutuhkan.

Pihak komunitas berfungsi sebagai *akselerator* / mempercepat. Pihak akademisi berfungsi sebagai *konseptor* / perencana. Pihak swasta / pebisnis berfungsi sebagai *enabler* / penyedia. Pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah berfungsi sebagai *controller* dan *regulator* / pengendali dan pengawas. Pihak media / pers berfungsi sebagai *katalisator* / penghubung.

Kontribusi *pentahelix* pada pengembangan desa wisata (Pusparani & Rianto, 2021; Rahu, 2021); perkembangan pariwisata kota (Hardianto *et al.*, 2019; Vani *et al.*, 2020); mengembangkan potensi pariwisata di provinsi (Ariowo, Wirapraja, & Dian Putra, 2018) ; pemulihan pariwisata pasca bencana erupsi gunung berapi (Rizkiyah *et al.*, 2019)

Kontribusi Komunitas pada STD

Peran komunitas pada desa wisata berbeda pada wisata pedesaan. Komunitas dapat berbentuk pokdarwis, karang taruna, rukun ibu, PKK dll. Pada desa wisata komunitas bertujuan untuk pengembangan desa agar jumlah wisatawan meningkat dan secara nilai ekonomi mulai meningkat. Hal ini disebabkan umumnya wisatawan bersedia membayar agar mendapat pengalaman berada di pedesaan (Nugroho, 2018). Dalam hal ini komunitas akan membantu mempromosikan melalui media sosial, mencari dana CSR dari perusahaan, mencari dana ke pemerintah pusat maupun perintah daerah agar dapat menambah amenities maupun fasilitas (Syafi'i & Suwando, 2015).

Peran komunitas pada wisata pedesaan berupa percepatan pengembangan desa, namun tetap memprioritaskan ketahanan budaya, tidak merubah sosial secara drastis dan selalu berusaha mempreservasi alam. Dalam hal ini masyarakat dan komunitas akan membentuk *community based tourism*, dimana pengelolaan dan pengembangan secara mandiri (A'inun *et al.*, 2015) termasuk dalam hal pembagian keuntungan.

Pada wisata pedesaan masyarakat dan komunitas merupakan penggerak utama, sedangkan pada desa wisata keduanya sering tidak dilibatkan atau tidak diberi hak sepenuhnya (A'inun, Krisnani, & Darwis, 2015).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran komunitas pada desa wisata adalah meningkatkan jumlah amenities dan memperbaiki aksesibilitas agar meningkatkan jumlah

wisatawan. Berbeda dengan wisata pedesaan, disini komunitas berusaha meningkatkan perkembangan desa dengan mempertahankan nilai sosial, budaya dan alam. Sehingga peningkatan amenities dan aksesibilitas semata-mata adalah untuk kesejahteraan desa

Kontribusi Akademisi pada STD

Akademisi pada desa wisata berfungsi merencanakan atraksi dan aktivitas untuk menambah jumlah wisatawan untuk meningkatkan aspek ekonomi dan juga merencanakan amenities dan aksesibilitas agar sesuai harapan wisatawan

Pada wisata pedesaan akademisi berfungsi Merencanakan atraksi dan aktivitas yang melibatkan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya dan alam. Fungsi lain adalah merencanakan amenities dan aksesibilitas untuk kenyamanan masyarakat selanjutnya baru wisatawan

Kontribusi Swasta pada STD

Pihak swasta (bisnis) pada desa wisata berfungsi untuk menghadirkan barang dan jasa untuk promosi sekaligus pengembang perekonomian desa wisata.

Pada wisata pedesaan pihak swasta (bisnis) berfungsi untuk Menghadirkan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya dan alam

Kontribusi Pemerintah pada STD

Tugas pemerintah terkait *sustainable tourism development* (STR) berarti harus membuat dan mengontrol kebijakan (*controller* dan *regulator*) terkait dengan alam, sosial-budaya dan perekonomian. Oleh sebab itu tugas pemerintah pada desa wisata maupun wisata pedesaan sangat berbeda. Pemerintah dibagi menjadi tiga jenis yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Fungsi pemerintah pusat (kemenparekraf) pada desa wisata dan/atau wisata pedesaan adalah sebagai pembuat kebijakan dan pengawas kebijakan yang bersifat major. Sedangkan fungsi pemerintah daerah adalah bertugas membuat kebijakan skala kota / kabupaten atau dapat disingkat tubinlakwas kebijakan pariwisata (pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan) (Rizkiyah, Liyushiana, & Herman, 2019). Beberapa tugas lain misalnya: analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata, pembuatan video profil pariwisata daerah, pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata, pembinaan duta wisata (Vani, Priscilia, & Adianto, 2020). Pemerintah daerah dapat berupa; disbudpar kota (Vani, Priscilia, & Adianto,

2020), BPMPT kota, Bappeda kota (Hardianto *et al.*, 2019).

Pemerintah pada tingkat desa (pemdes) bertugas untuk membuat kebijakan yang bersifat mikro namun berpengaruh besar terhadap warga desa tersebut. Beberapa unit pemerintah desa adalah: BUM desa (Pedoman.Desa.Wisata, 2021), BPD, camat dan lurah. Pendanaannya dapat berasal dari penganggaran-pembiayaan desa maupun dari dana desa. Pemerintah desa memiliki tugas remeh namun sulit, misalnya: menyamakan visi-misi pemdes dengan masyarakat desa, melakukan pendekatan yang humanis-intensif, membentuk lembaga, memberikan penguatan kepada organisasi tingkat desa (Pusparani & Rianto, 2021), mengadakan musyawarah desa, menyusun rancangan RKP desa dan APB Desa (Pedoman.Desa.Wisata, 2021).

Pemdes pada desa wisata berfungsi sebagai pembuat peraturan terkait wisata berdasarkan musyawarah desa, yang berorientasi pada aspek kemajuan perekonomian desa (utama), namun aspek sosial-budaya dan lingkungan adalah prioritas berikutnya (penunjang). Begitu pula saat penyusunan RKP desa dan APB desa, orientasinya adalah untuk menaikkan tingkat wisatawan sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Sehingga pembangunan amenities terkait kenyamanan wisatawan, pembangunan aksesibilitas demi kemudahan wisatawan dan atraksi yang dapat menyenangkan wisatawan merupakan penyerap anggaran terbesar desa wisata.

Berbeda dengan wisata pedesaan, pemdes berfungsi sebagai pembuat peraturan terkait kemakmuran warga dengan tetap mengacu pada sosial, budaya dan alam. Fungsi lainnya adalah Penanggung jawab kegiatan dan dana untuk kegiatan kesejahteraan warga desa (utama) dan pengembangan sektor wisata (penunjang).

Terkait arsitektural, perwujudan aspek amenities dan aksesibilitas dapat berbentuk: gazebo, gerai cinderamata, gerai makanan, panggung hiburan, toilet umum, ruang ganti, tempat sampah, jalan penghubung, penanda / himbuan (Rahu, 2021).

Kontribusi Media / Pers pada STD

Pihak media / pers pada desa wisata berfungsi sebagai Pemberi informasi melalui media periklanan mengenai keunikan desa yang dapat dijual demi peningkatan citra desa wisata.

Pada wisata pedesaan, pihak media / pers berfungsi Pemberi informasi melalui media periklanan mengenai keunikan desa yang mendukung sosial, budaya namun tetap memepertahankan alam.

Tabel 1. Kontribusi Pelaku Kegiatan

N	Kontribusi	Desa	Wisata
---	------------	------	--------

o	Pelaku Kegiatan	Wisata	Pedesaan
1	Masyarakat dan pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> Beraktifitas sesuai harapan wisatawan dan bersifat menyenangkan wisatawan 	<ul style="list-style-type: none"> Beraktifitas rutin sebagai masyarakat pedesaan, jika berkenan wisatawan dipersilahkan terlibat
2	Komunitas (sebagai akselerator)	<ul style="list-style-type: none"> Mempercepat pengembangan desa dari sisi ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> mempercepat perkembangan desa dari sisi sosial, budaya dan ramah alam
3	Akademisi (sebagai konseptor)	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan atraksi dan aktivitas untuk menambah jumlah wisatawan untuk meningkatkan aspek ekonomi Merencanakan amenities dan aksesibilitas agar sesuai harapan wisatawan 	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan atraksi dan aktivitas yang melibatkan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya dan alam Merencanakan amenities dan aksesibilitas untuk kenyamanan masyarakat selanjutnya baru wisatawan
4	Bisnis (sebagai enabler)	<ul style="list-style-type: none"> Menghadirkan barang dan jasa untuk promosi sekaligus pengembangan perekonomian desa wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> Menghadirkan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya dan alam
5	Pemerintah (regulator dan kontroler)	<ul style="list-style-type: none"> Pembuat peraturan terkait wisata yang berorientasi pada kemajuan perekonomian desa Penanggung jawab kegiatan dan dana untuk kegiatan pengembangan desa wisata 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuat peraturan terkait kemakmuran warga dengan tetap mengacu pada sosial, budaya dan alam Penanggung jawab kegiatan dan dana untuk kegiatan kesejahteraan warga desa (utama) dan pengembangan sektor

			wisata (penunjang)
6	Media / Pers (sebagai katalisator)	<ul style="list-style-type: none"> Pemberi informasi melalui media periklanan mengenai keunikan desa yang dapat dijual demi peningkatan citra desa wisata 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberi informasi melalui media periklanan mengenai keunikan desa yang mendukung sosial, budaya namun tetap mempertahankan alam

Perwujudan STD pada arsitektural

Definisi desa wisata dan wisata pedesaan dianggap adalah berbeda (Febrianto, 2023) dan dianggap sebagai salah satu perwujudan *sustainable tourism development / STD* oleh beberapa kementerian terutama Kemenparekraf (Permenparekraf_No.9, 2021) dan Kemendes PDDT (Permendesa_No.13, 2020). Bahkan beberapa kementerian juga menerbitkan buku panduan mengenai desa wisata (Panduan.Desa.Wisata.Hijau, 2017; Pedoman.Desa.Wisata, 2021)

Perbedaan definisi desa wisata dan wisata pedesaan mengerucutkan perwujudan STD pada ranah arsitektural. Konsep pembangunan desa wisata bersifat *top down planning* (bukan *bottom-up planning*), selain ini juga mengandung prinsip membangun desa (bukan desa membangun). Fenomena yang sempat terjadi, sehingga banyak bangunan terbangun tidak sesuai keinginan masyarakat.

Sedangkan konsep pembangunan wisata pedesaan bersifat *bottom up planning* dan mengandung prinsip desa membangun. Fenomena yang saat ini terjadi, pemerintah memberi hibah, bangunan disesuaikan dengan kebutuhan. Beberapa perwujudannya berupa aplikasi pengelola desa wisata nusantara oleh Kemendesa PDDT (desawisata.kemendesa.go.id, 2023) dan lomba desa wisata nusantara (dwn2023.com, 2023).

Sebelum memutuskan menjadi desa wisata maupun wisata pedesaan diperlukan komitmen dari kemitraan pentahelix agar tidak terlalu banyak mengubah alam, tetap mempertahankan sosial-budaya dan mengandung prinsip *green economy*. Green economy harus memperhatikan dengan pengelolaan yang berintegrasi dengan lingkungan, salah satunya dengan menjunjung tinggi konsep green economy pada tiap sendi aktivitas desa wisata. (Febrianto *et al.*, 2022; Noviarita *et al.*, 2021; Setiyowati, 2023)

Green economy juga dapat dilihat dari indikator jumlah wisatawan dan daya tampung tapak desa wisata. Prosentase pengunjung 75-

100% masih dikatakan aman, namun dianggap *unsustainable tourism development* jika melebihi 150% kapasitas (Blackwall, 2015).

Green economy juga memiliki perwujudan aktifitas berupa mitigasi perubahan iklim, pengurangan polusi, penggunaan energi terbarukan, pembuangan limbah (Streimikiene *et al.*, 2021). Sehingga tiga aspek utama STD (sosial-budaya, alam dan ekonomi) sehingga membentuk desa wisata dan/atau wisata pedesaan berfungsi sebagai pelengkap kehidupan masa kini dan sebagai daya tarik yang mendatangkan keuntungan (Liu, 2003)

KESIMPULAN

Konsep sustainable tourism development (STD) sangat dipengaruhi oleh kontribusi pentahelix. Sehingga prinsip “desa membangun” dan “membangun desa” sangat ditentukan oleh seberapa besar kontribusi dari kemitraan pentahelix. Sebelum memutuskan menjadi desa wisata maupun wisata pedesaan diperlukan komitmen dari kemitraan pentahelix agar tidak terlalu banyak mengubah alam, tetap mempertahankan sosial-budaya dan mengandung prinsip *green economy*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Ketua LPPM ITN Malang atas bantuan hibah penelitian internal dan abdimas internal.

DAFTAR PUSTAKA

- A'inun, F., Krisnani, H., & Darwis, R. S. (2015). Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep Community Based Tourism. *PROSIDING KS: Riset & PKM*, 2(3), 301 - 444
- Aribowo, H., Wirapraja, A., & Dian Putra, Y. (2018). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Mebis (Manajemen dan Bisnis)*, 3. doi:10.33005/mebis.v3i1.21
- Blackwall, W. (2015). *Reconnecting the City The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage* (F. B. R. v. Oers Ed.). West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
- BPS.Indonesia. (2021). *Statistik Potensi Desa Indonesia*.
- Creswell, J. (2010). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- desawisata.kemendesa.go.id. (2023). Aplikasi Pengelola Desa Wisata Nusantara oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- (Kemendesa PDTT). Retrieved from <https://desawisata.kemendesa.go.id/>
- Febrianto, R. S. (2023). Konsep dan Paradigma Pariwisata Berkelanjutan. In D. P. Sari (Ed.), *Ekonomi Pariwisata* (pp. 97-113). Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Febrianto, R. S., Putra, G. A., Rahman, N. A., Ajiza, M., & Winarni, S. (2022). *Study Of Categories And Forming Elements Of Green Tourism Village Based On Green Tourism*. Paper presented at the The 9th International Conference on Engineering, Technology, and Industrial Application (ICETIA) 2022.
- Groat, L. N., & Wang, D. (2013). *Architectural Research Methods* (Second ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Hardianto, W. T., Sumartono, Muluk, M. R. K., & Wijaya, F. (2019). PentaHelix Synergy on Tourism Development in Batu, East Java. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(6).
- ldwn2023.com. (2023). Lomba Desa Wisata Nusantara oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Retrieved from <https://www.ldwn2023.com/>
- Liu, Z. (2003). Sustainable Tourism Development: A Critique. *Journal of Sustainable Tourism*, 11(6), 459-475. doi:<https://doi.org/10.1080/09669580308667216>
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Pengelolaan Desa Wisata Dengan Konsep Green Economy Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Wisata Di Provinsi Lampung Dan Jawa Barat). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(02).
- Nugroho, I. (2018). Perencanaan Pembangunan Ekowisata dan Desa Wisata. *BAPPENAS Working Papers*, 1(1), 98-103. doi:<https://doi.org/10.47266/bwp.v1i1.13>
- Panduan.Desa.Wisata.Hijau. (2017). *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (KemenkopUKM) Republik Indonesia
- Pedoman.Desa.Wisata. (2021). *Pedoman Desa Wisata: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi* (Kemenko Marves) Republik Indonesia.
- Permendesa_No.13. (2020). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*.
- Permenparekraf_No.9. (2021). *Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi*

Pariwisata Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

- Pusparani, & Rianto. (2021). Implementasi Konsep Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Cibuntu. *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata*, 4(1), 24-31.
doi:<https://doi.org/10.32528/sw.v4i1.5389>
- Rahu, P. D. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 13-24.
- Rizkiyah, P., Liyushiana, & Herman. (2019). Sinergitas Pentahelix Dalam Pemulihan Pariwisata Pasca Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. *Jurnal IPTA*, 7(2), 247-256.
- Setiyowati, A. (2023). Konsep Green Economy. In R. Kurnia (Ed.), *Green Economy Dalam Perspektif Syariah: Az-Zahra Media Society*.
- Streimikiene, D., Svagzdiene, B., Jasinskas, E., & Simanavicius, A. (2021). Sustainable Tourism Development And Competitiveness: The Systematic Literature Review. *Sustainable Development Journal*, 29, 259–271.
doi:<https://doi.org/10.1002/sd.2133>
- Syafi'i, M., & Suwandono, D. (2015). Perencanaan Desa Wisata Dengan Pendekatan Konsep Community Based Tourism (CBT) Di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. *Jurnal Ruang*, 1(2), 51-60.
- Tadung, E. (2023). Opportunities and Challenges of Pentahelix Collaboration for Poverty Alleviation in Indonesia: A Systematic Literature Review. *KnE Social Sciences*, 8(17), 289–303.
doi:<https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14122>
- Vani, R. V., Priscilia, S. O., & Adianto. (2020). Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 8(1), 63-70.
doi:10.31289/publika.v8i1.3361